



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Daerah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya, perlu melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pendapatan Transfer adalah Pendapatan Daerah yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah.

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang merupakan hak Daerah dan/atau yang masuk ke Kas Umum Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban Daerah.
11. Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp2.189.690.575.218,00 (dua triliun seratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp4.091.744.064,00 (empat miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.193.782.319.282,00 (dua triliun seratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. semula	Rp 2.049.661.519.130,00
2. bertambah	<u>Rp 44.587.684.924,00</u>
jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp 2.094.249.204.054,00
b. Belanja Daerah	
1. semula	Rp2.124.690.575.218,00
2. bertambah	<u>Rp Rp4.091.744.064,00</u>
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp 2.128.782.319.282,00
total Defisit setelah perubahan	Rp 34.533.115.228,00
c. Pembiayaan Daerah	
1. semula	Rp 75.029.056.088,00
2. berkurang	<u>Rp 40.495.940.860,00</u>
jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp 34.533.115.228,00
pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 34.533.115.228,00
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. semula	Rp 411.525.005.193,00
2. bertambah	<u>Rp 29.409.098.822,00</u>
jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp 440.934.104.015,00
b. Pendapatan Transfer	
1. semula	Rp 1.638.136.513.937,00
2. bertambah	<u>Rp 15.178.586.102,00</u>
jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp 1.653.315.100.039,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak Daerah	
1. semula	Rp 138.418.634.896,00
2. bertambah	<u>Rp 8.730.000.000,00</u>
jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp 147.148.634.896,00
b. retribusi Daerah	
1. semula	Rp 198.471.211.768,00
2. bertambah	<u>Rp 12.142.259.504,00</u>
jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp 210.613.471.272,00
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1. semula	Rp 21.298.004.241,00
2. bertambah	<u>Rp 1.718.525.982,00</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 23.016.530.223,00
d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1. semula	Rp 53.337.154.288,00
2. bertambah	<u>Rp 6.818.313.336,00</u>
jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp 60.155.467.624,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. transfer pemerintah pusat	
1. semula	Rp 1.556.822.184.000,00
2. berkurang	<u>Rp 14.420.771.683,00</u>
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp 1.542.401.412.317,00
b. transfer antar daerah	
1. semula	Rp 81.314.329.937,00
2. bertambah	<u>Rp 29.599.357.785,00</u>
jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp 110.913.687.722,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. belanja operasi	
1. semula	Rp 1.595.817.398.614,02
2. bertambah	<u>Rp 20.242.425.151,98</u>
jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp 1.616.059.823.766,00
b. belanja modal	
1. semula	Rp 133.570.669.729,98
2. berkurang	<u>Rp 24.187.939.914,98</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 109.382.729.815,00
c. belanja tidak terduga	
1. semula	Rp 1.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp 0,00</u>
jumlah tidak terduga setelah perubahan	Rp 1.000.000.000,00
d. belanja transfer	
1. semula	Rp 394.302.506.874,00
2. bertambah	<u>Rp 8.037.258.827,00</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 402.339.765.701,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai	
1. semula	Rp 977.338.529.883,37
2. bertambah	<u>Rp 5.294.933.365,63</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 982.633.463.249,00
b. belanja barang dan jasa	
1. semula	Rp 489.112.324.830,65
2. bertambah	<u>Rp 33.294.553.786,35</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 522.406.878.617,00
c. belanja hibah	
1. semula	Rp 125.467.412.900,00
2. berkurang	<u>Rp 18.080.273.500,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 107.387.139.400,00
d. belanja bantuan sosial	
1. semula	Rp 3.899.131.000,00
2. berkurang	<u>Rp 266.788.500,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 3.632.342.500,00

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. belanja modal peralatan dan mesin

1. semula	Rp	63.172.098.727,98
2. berkurang	Rp	<u>721.954.081,98</u>
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		
	Rp	62.450.144.646,00
 - b. belanja modal gedung dan bangunan

1. semula	Rp	14.970.671.400,00
2. berkurang	Rp	<u>7.281.492.000,00</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan		
	Rp	7.689.179.400,00
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1. semula	Rp	50.360.754.000,00
2. berkurang	Rp	<u>19.212.476.000,00</u>
jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan		
	Rp	31.148.278.000,00
 - d. belanja modal aset tetap lainnya

1. semula	Rp	4.971.395.602,00
2. bertambah	Rp	<u>3.110.732.167,00</u>
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		
	Rp	8.082.127.769,00
 - e. belanja modal aset lainnya

1. semula	Rp	95.750.000,00
2. berkurang	Rp	<u>82.750.000,00</u>
jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan		
	Rp	13.000.000,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:
- a. semula

	Rp	1.000.000.000,00
--	----	------------------
 - b. bertambah

	Rp	<u>0,00</u>
--	----	-------------
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		
	Rp	1.000.000.000,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil

1. semula	Rp	8.800.736.874,00
2. bertambah	Rp	<u>6.187.863.490,00</u>
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		
	Rp	14.988.600.364,00
 - b. belanja bantuan keuangan

1. semula	Rp	385.501.770.000,00
2. bertambah	Rp	<u>1.849.395.337,00</u>
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		
	Rp	387.351.165.337,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan	
1. semula	Rp 140.029.056.088,00
2. berkurang	<u>Rp 40.495.940.860,00</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 99.533.115.228,00
b. pengeluaran pembiayaan	
1. semula	Rp 65.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp 0,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 65.000.000.000,00

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas SiLPA tahun sebelumnya:

a. semula	Rp 140.029.056.088,00
b. berkurang	<u>Rp 40.495.940.860,00</u>
jumlah SiLPA tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 99.533.115.228,00

Pasal 9

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas pembentukan dana cadangan:

a. semula	Rp 65.000.000.000,00
b. bertambah	<u>Rp 0,00</u>
jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp 65.000.000.000,00

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Ketentuan mengenai perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. lampiran I : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. lampiran II : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. lampiran III : rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. lampiran IV : rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. lampiran V : rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. lampiran VI : rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. lampiran VII : sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan APBD;
- h. lampiran VIII : sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
- i. lampiran IX : sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;

- j. lampiran X : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - k. lampiran XI : daftar piutang Daerah;
 - l. lampiran XII : daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
 - m. lampiran XIII : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
 - n. lampiran XIV : daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
 - o. lampiran XV : daftar dana cadangan;
 - p. lampiran XVI : daftar pinjaman Daerah; dan
 - q. lampiran XVII : sinkronisasi *major project* dengan dukungan program prioritas Daerah,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **26 September 2025**

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **26 September 2025**

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


RIPTIO SUSILO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3-226/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

APBD merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai dasar bagi pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang didasarkan pada rencana kerja pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Dengan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya, telah disusun perubahan rencana kerja pemerintah Daerah tahun 2025 yang disertai dengan perubahan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara. Perubahan rencana kerja pemerintah Daerah tahun 2025 tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2025.

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memuat pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah selama sisa waktu tahun anggaran berjalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 183



KABUPATEN TEMANGGUNG
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	411.525.005.193,00	440.934.104.015,00	29.409.098.822,00
4.1.01	Pajak Daerah	138.418.634.896,00	147.148.634.896,00	8.730.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	198.471.211.768,00	210.613.471.272,00	12.142.259.504,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.298.004.241,00	23.016.530.223,00	1.718.525.982,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	53.337.154.288,00	60.155.467.624,00	6.818.313.336,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.638.136.513.937,00	1.653.315.100.039,00	15.178.586.102,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.556.822.184.000,00	1.542.401.412.317,00	-14.420.771.683,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.314.329.937,00	110.913.687.722,00	29.599.357.785,00
	Jumlah Pendapatan	2.049.661.519.130,00	2.094.249.204.054,00	44.587.684.924,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.595.817.398.614,02	1.616.059.823.766,00	20.242.425.151,98
5.1.01	Belanja Pegawai	977.338.529.883,37	982.633.463.249,00	5.294.933.365,63
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.112.324.830,65	522.406.878.617,00	33.294.553.786,35
5.1.05	Belanja Hibah	125.467.412.900,00	107.387.139.400,00	-18.080.273.500,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.899.131.000,00	3.632.342.500,00	-266.788.500,00
5.2	BELANJA MODAL	133.570.669.729,98	109.382.729.815,00	-24.187.939.914,98
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.172.098.727,98	62.450.144.646,00	-721.954.081,98
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.970.671.400,00	7.689.179.400,00	-7.281.492.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.360.754.000,00	31.148.278.000,00	-19.212.476.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.971.395.602,00	8.082.127.769,00	3.110.732.167,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	95.750.000,00	13.000.000,00	-82.750.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	394.302.506.874,00	402.339.765.701,00	8.037.258.827,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.800.736.874,00	14.988.600.364,00	6.187.863.490,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	385.501.770.000,00	387.351.165.337,00	1.849.395.337,00
	Jumlah Belanja	2.124.690.575.218,00	2.128.782.319.282,00	4.091.744.064,00
	Total Surplus/(Defisit)	-75.029.056.088,00	-34.533.115.228,00	40.495.940.860,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	140.029.056.088,00	99.533.115.228,00	-40.495.940.860,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	140.029.056.088,00	99.533.115.228,00	-40.495.940.860,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	75.029.056.088,00	34.533.115.228,00	-40.495.940.860,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00



BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN, S.E.



KABUPATEN TEMANGGUNG

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	234.858.155.056,00	243.627.450.883,00	1.151.394.201.279,37	1.197.718.330.506,00	111.894.168.991,00	97.127.795.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.288.370.270,37	1.294.846.126.174,00	31.557.755.903,63		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	160.000.000,00	160.000.000,00	707.090.216.435,37	718.369.826.262,00	15.471.756.541,00	19.130.542.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.561.972.976,37	737.500.369.185,00	14.938.396.208,63		
1	01	1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	160.000.000,00	160.000.000,00	707.090.216.435,37	718.369.826.262,00	15.471.756.541,00	19.130.542.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.561.972.976,37	737.500.369.185,00	14.938.396.208,63		
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	230.055.655.056,00	238.829.950.883,00	370.136.749.221,00	403.076.552.141,00	47.044.370.450,00	48.912.736.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.181.119.671,00	451.989.288.886,00	34.808.169.215,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	160.000.000,00	180.000.000,00	164.280.415.615,00	166.537.370.255,00	16.788.770.000,00	18.103.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.069.185.615,00	184.641.190.255,00	3.572.004.640,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	180.000.000.000,00	186.000.000.000,00	137.800.000.000,00	161.857.824.264,00	28.496.800.000,00	27.666.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.296.800.000,00	189.524.624.264,00	23.227.824.264,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Parakan	2.532.500.000,00	2.532.500.000,00	2.976.817.000,00	3.119.839.491,00	96.625.000,00	96.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073.442.000,00	3.216.464.491,00	143.022.491,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Traji	1.067.101.980,00	1.092.311.000,00	1.588.259.980,00	1.704.049.045,00	30.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.259.980,00	1.744.049.045,00	125.789.065,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Kledung	1.466.521.616,00	1.654.405.067,00	2.267.166.616,00	2.631.645.000,00	40.000.000,00	116.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.166.616,00	2.748.145.000,00	440.978.384,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Bansari	1.283.274.000,00	1.550.000.001,00	2.224.631.000,00	2.522.771.865,00	6.000.000,00	74.907.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.631.000,00	2.597.679.365,00	367.048.365,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Bulu	2.914.957.000,00	2.914.957.000,00	3.828.346.000,00	4.104.652.929,00	72.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.346.000,00	4.201.652.929,00	301.306.929,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Temanggung	2.314.078.664,00	2.319.078.664,00	3.062.971.664,00	3.267.185.008,00	140.000.000,00	203.575.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.971.664,00	3.470.760.520,00	267.788.856,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Dharma Rini	1.803.022.752,00	1.862.190.135,00	2.366.872.752,00	2.691.155.208,00	180.300.000,00	156.185.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.172.752,00	2.847.340.547,00	300.167.795,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Tlogomulyo	1.101.500.000,00	1.152.310.406,00	1.960.609.000,00	2.134.277.826,00	40.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.609.000,00	2.200.277.826,00	199.668.826,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Tembarak	2.027.000.000,00	2.051.709.573,00	2.700.124.000,00	2.854.359.521,00	60.810.000,00	523.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.934.000,00	3.377.359.521,00	616.425.521,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Selopampang	1.785.364.000,00	1.799.446.000,00	2.659.473.000,00	2.788.525.528,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.473.000,00	2.813.525.528,00	129.052.528,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Kranggan	1.523.946.312,00	1.523.946.312,00	2.172.566.312,00	2.365.752.646,00	9.250.000,00	44.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.816.312,00	2.409.912.646,00	228.096.334,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Pare	1.129.479.959,00	1.178.625.933,00	1.527.234.959,00	1.771.902.318,00	36.474.000,00	44.649.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.708.959,00	1.816.551.329,00	252.842.370,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Pringsurat	1.958.407.294,00	2.750.000.000,00	2.482.065.294,00	3.294.521.283,00	27.500.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509.565.294,00	3.329.521.283,00	819.955.989,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Rejosari	1.293.742.000,00	1.438.742.000,00	1.886.870.000,00	2.075.204.779,00	64.742.000,00	74.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.612.000,00	2.149.946.779,00	198.334.779,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Kaloran	1.615.925.825,00	1.615.925.825,00	2.134.535.825,00	2.242.162.078,00	80.796.000,00	80.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.331.825,00	2.322.958.078,00	107.626.253,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Tepusen	1.043.444.000,00	1.095.560.700,00	1.622.086.000,00	1.719.464.373,00	30.980.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.066.000,00	1.771.464.373,00	118.398.373,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Kandangan	2.984.034.680,00	2.841.380.000,00	3.859.423.680,00	3.906.378.026,00	110.000.000,00	102.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969.423.680,00	4.008.428.026,00	39.004.346,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Kedu	2.665.000.000,00	3.100.000.000,00	3.347.182.000,00	3.908.644.045,00	100.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447.182.000,00	4.258.644.045,00	811.462.045,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Ngadirejo	3.520.000.000,00	3.555.400.000,00	4.254.150.000,00	4.492.375.189,00	10.000.000,00	182.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264.150.000,00	4.675.125.189,00	410.975.189,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	Puskesmas Banjarsari	1.369.968.112,00	1.407.063.562,00	1.819.829.162,00	2.011.385.441,00	91.080.950,00	91.080.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.910.112,00	2.102.466.391,00	191.556.279,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0022	Puskesmas Jumo	1.467.000.000,00	1.800.925.000,00	2.341.007.000,00	2.738.895.142,00	73.350.000,00	120.600.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414.357.000,00	2.859.495.642,00	445.138.642,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0023	Puskesmas Gemawang	2.554.500.000,00	2.750.000.000,00	3.307.113.000,00	3.664.610.956,00	50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357.113.000,00	3.764.610.956,00	407.497.956,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Candirotto	1.905.150.000,00	1.905.150.000,00	2.805.755.000,00	2.951.964.288,00	95.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.755.000,00	3.050.964.288,00	150.209.288,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0025	Puskesmas Bejen	2.795.000.000,00	2.795.000.000,00	3.544.143.000,00	3.728.423.372,00	139.750.000,00	149.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.893.000,00	3.877.423.372,00	193.530.372,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0026	Puskesmas Tretep	1.215.000.000,00	1.275.600.000,00	1.898.400.000,00	2.001.976.863,00	60.750.000,00	90.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.150.000,00	2.092.726.863,00	133.576.863,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0027	Puskesmas Wonoboyo	2.559.736.862,00	2.687.723.705,00	3.418.701.362,00	3.989.235.402,00	88.392.500,00	126.744.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507.093.862,00	4.115.980.335,00	608.886.473,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.627.500.000,00	2.627.500.000,00	19.770.506.528,00	21.193.541.473,00	47.329.170.000,00	27.759.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.099.676.528,00	48.953.235.473,00	-18.146.441.055,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.627.500.000,00	2.627.500.000,00	19.770.506.528,00	21.193.541.473,00	47.329.170.000,00	27.759.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.099.676.528,00	48.953.235.473,00	-18.146.441.055,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.015.000.000,00	2.010.000.000,00	10.168.889.000,00	10.679.994.300,00	548.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716.889.000,00	10.679.994.300,00	-36.894.700,00
1	04	1.04.2.11.1.03.04.0000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	8.643.798.000,00	9.181.643.500,00	548.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.191.798.000,00	9.181.643.500,00	-10.154.500,00
1	04	1.04.2.11.1.03.04.0000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	2.015.000.000,00	2.010.000.000,00	1.525.091.000,00	1.498.350.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.091.000,00	1.498.350.800,00	-26.740.200,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	0,00	13.327.355.526,00	15.167.949.412,00	1.456.588.000,00	1.279.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.783.943.526,00	16.447.079.412,00	1.663.135.886,00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	9.824.831.096,00	10.356.855.396,00	1.078.570.000,00	1.083.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.903.401.096,00	11.440.625.396,00	537.224.300,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	3.502.524.430,00	4.811.094.016,00	378.018.000,00	195.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880.542.430,00	5.006.454.016,00	1.125.911.586,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	0,00	30.900.484.569,00	29.230.466.918,00	44.284.000,00	45.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.944.768.569,00	29.276.158.918,00	-1.668.609.651,00
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	0,00	0,00	30.900.484.569,00	29.230.466.918,00	44.284.000,00	45.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.944.768.569,00	29.276.158.918,00	-1.668.609.651,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.975.140.000,00	6.780.140.000,00	156.280.813.020,03	153.752.871.091,00	16.603.638.440,00	9.122.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.884.451.460,03	162.875.240.091,00	-10.009.211.369,03		
2	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	3.924.000.000,00	3.742.894.680,00	800.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724.000.000,00	4.642.894.680,00	-81.105.320,00		
2	01	1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	3.924.000.000,00	3.742.894.680,00	800.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724.000.000,00	4.642.894.680,00	-81.105.320,00		
2	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	22.314.937.584,00	22.351.341.159,00	2.542.442.000,00	2.506.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.857.379.584,00	24.858.283.159,00	903.575,00		
2	04	1.04.2.11.1.03.04.0000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	22.314.937.584,00	22.351.341.159,00	2.542.442.000,00	2.506.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.857.379.584,00	24.858.283.159,00	903.575,00		
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	16.333.461.271,03	15.991.706.842,00	662.831.400,00	662.940.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.996.292.671,03	16.654.647.242,00	-341.645.429,03		
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	4.759.303.671,00	4.441.644.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759.303.671,00	4.441.644.792,00	-317.658.879,00		
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	11.574.157.600,03	11.550.062.050,00	662.831.400,00	662.940.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.236.989.000,03	12.213.002.450,00	-23.986.550,03		
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	205.000.000,00	205.000.000,00	25.689.346.754,00	25.801.121.240,00	7.011.547.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700.893.754,00	25.828.521.240,00	-6.872.372.514,00		
2	09	2.09.3.27.3.25.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	205.000.000,00	205.000.000,00	25.689.346.754,00	25.801.121.240,00	7.011.547.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700.893.754,00	25.828.521.240,00	-6.872.372.514,00		
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	6.340.404.315,00	6.235.298.272,00	1.500.000,00	179.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341.904.315,00	6.414.408.272,00	72.503.957,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	6.340.404.315,00	6.235.298.272,00	1.500.000,00	179.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341.904.315,00	6.414.408.272,00	72.503.957,00		
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	7.286.969.818,00	7.593.905.880,00	58.502.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.345.472.258,00	7.593.905.880,00	248.433.622,00		
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	7.286.969.818,00	7.593.905.880,00	58.502.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.345.472.258,00	7.593.905.880,00	248.433.622,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.025.000.000,00	830.000.000,00	20.608.636.408,00	20.253.752.754,00	4.456.382.000,00	4.372.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.065.018.408,00	24.626.584.754,00	-438.433.654,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	1.025.000.000,00	830.000.000,00	20.608.636.408,00	20.253.752.754,00	4.456.382.000,00	4.372.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.065.018.408,00	24.626.584.754,00	-438.433.654,00		
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	0,00	8.606.340.164,00	9.194.580.352,00	585.719.600,00	49.819.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192.059.764,00	9.244.399.952,00	52.340.188,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	1.300.000,00	374.880.000,00	373.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000.000,00	374.880.000,00	-120.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	8.590.040.164,00	8.809.798.852,00	212.019.600,00	49.819.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.802.059.764,00	8.859.618.452,00	57.558.688,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	15.000.000,00	9.901.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	9.901.500,00	-5.098.500,00		
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	15.300.407.753,00	14.484.609.020,00	350.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650.407.753,00	14.784.609.020,00	-865.798.733,00		
2	17	2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	15.300.407.753,00	14.484.609.020,00	350.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650.407.753,00	14.784.609.020,00	-865.798.733,00		
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	0,00	3.656.345.263,00	3.458.891.948,00	117.414.000,00	117.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773.759.263,00	3.576.216.948,00	-197.542.315,00		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	3.656.345.263,00	3.458.891.948,00	117.414.000,00	117.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773.759.263,00	3.576.216.948,00	-197.542.315,00		
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	145.140.000,00	145.140.000,00	12.863.927.229,00	12.016.287.852,00	17.300.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.881.227.229,00	12.022.287.852,00	-858.939.377,00		
2	22	2.22.3.26.0.00.03.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	145.140.000,00	145.140.000,00	12.863.927.229,00	12.016.287.852,00	17.300.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.881.227.229,00	12.022.287.852,00	-858.939.377,00		
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	5.717.124.662,00	5.389.426.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717.124.662,00	5.389.426.957,00	-327.697.705,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	5.707.129.662,00	5.384.077.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707.129.662,00	5.384.077.457,00	-323.052.205,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	9.995.000,00	5.349.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995.000,00	5.349.500,00	-4.645.500,00		
2	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0,00	0,00	7.638.911.799,00	7.239.054.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.638.911.799,00	7.239.054.135,00	-399.857.664,00		
2	31	3.31.2.07.3.32.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	7.638.911.799,00	7.239.054.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.638.911.799,00	7.239.054.135,00	-399.857.664,00		
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	300.000.000,00	300.000.000,00	34.189.445.407,00	28.375.219.517,00	136.300.000,00	397.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.325.745.407,00	28.773.034.517,00	-5.552.710.890,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	33.002.445.407,00	27.019.640.527,00	136.300.000,00	397.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.138.745.407,00	27.417.455.527,00	-5.721.289.880,00		
3	09	2.09.3.27.3.25.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00	150.000.000,00	254.665.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	254.665.170,00	104.665.170,00		
3	09	2.09.3.27.3.25.03.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00	32.852.445.407,00	26.764.975.357,00	136.300.000,00	397.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.988.745.407,00	27.162.790.357,00	-5.825.955.050,00		
3	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0,00	0,00	472.000.000,00	651.442.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000.000,00	651.442.640,00	179.442.640,00		
3	17	2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	472.000.000,00	651.442.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000.000,00	651.442.640,00	179.442.640,00		
3	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0,00	0,00	350.000.000,00	364.480.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	364.480.800,00	14.480.800,00		
3	22	2.22.3.26.0.00.03.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	350.000.000,00	364.480.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	364.480.800,00	14.480.800,00		
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	300.000.000,00	300.000.000,00	365.000.000,00	339.655.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000.000,00	339.655.550,00	-25.344.450,00		
3	31	3.31.2.07.3.32.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	300.000.000,00	300.000.000,00	365.000.000,00	339.655.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000.000,00	339.655.550,00	-25.344.450,00		
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	400.000.000,00	400.000.000,00	114.864.724.852,00	106.178.928.019,00	3.617.123.298,98	1.198.176.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.481.848.150,98	107.377.104.819,00	-11.104.743.331,98		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	400.000.000,00	400.000.000,00	56.965.028.046,00	57.848.489.434,00	3.477.611.998,98	1.133.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.442.640.044,98	58.982.319.434,00	-1.460.320.610,98		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0011	Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	313.134.750,00	275.824.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.134.750,00	275.824.025,00	-37.310.725,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0013	Bagian Hukum	0,00	0,00	1.240.427.800,00	1.121.553.208,00	1.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.074.800,00	1.121.553.208,00	-120.521.592,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0020	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina mental	0,00	0,00	25.634.489.600,00	26.441.958.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.634.489.600,00	26.441.958.250,00	807.468.650,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0021	Bagian Perekonomian	0,00	0,00	684.716.000,00	655.379.100,00	13.000.000,00	21.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.716.000,00	676.593.100,00	-21.122.900,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0022	Bagian Pembangunan	0,00	0,00	116.810.000,00	87.285.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.810.000,00	87.285.720,00	-29.524.280,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0023	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	135.522.800,00	91.253.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.522.800,00	91.253.316,00	-44.269.484,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0031	Bagian Umum	400.000.000,00	400.000.000,00	26.074.911.796,00	25.929.900.956,00	3.459.464.998,98	927.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.534.376.794,98	26.857.788.956,00	-2.676.587.838,98		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0032	Bagian Organisasi	0,00	0,00	74.750.000,00	81.346.600,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.250.000,00	81.346.600,00	3.096.600,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0033	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0,00	0,00	2.690.265.300,00	3.163.988.259,00	0,00	184.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.265.300,00	3.348.716.259,00	658.450.959,00		
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	57.899.696.806,00	48.330.438.585,00	139.511.300,00	64.346.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.039.208.106,00	48.394.785.385,00	-9.644.422.721,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	57.899.696.806,00	48.330.438.585,00	139.511.300,00	64.346.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.039.208.106,00	48.394.785.385,00	-9.644.422.721,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.807.029.224.074,00	1.843.042.613.171,00	40.161.412.090,62	36.570.811.077,00	22.000.000,00	340.701.600,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	394.302.506.874,00	402.339.765.701,00	435.485.918.964,62	440.251.278.378,00	4.765.359.413,38		
5	01		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	0,00	8.189.781.749,00	7.525.388.358,00	0,00	340.701.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189.781.749,00	7.866.089.958,00	-323.691.791,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	350.000.000,00	299.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	299.082.000,00	-50.918.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	7.839.781.749,00	7.226.306.358,00	0,00	340.701.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.839.781.749,00	7.567.007.958,00	-272.773.791,00		
5	02		KEUANGAN	1.807.029.224.074,00	1.843.042.613.171,00	26.068.441.310,00	22.798.744.058,00	22.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	394.302.506.874,00	402.339.765.701,00	421.392.948.184,00	426.138.509.759,00	4.745.561.575,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.04.0000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.807.029.224.074,00	1.843.042.613.171,00	26.068.441.310,00	22.798.744.058,00	22.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	394.302.506.874,00	402.339.765.701,00	421.392.948.184,00	426.138.509.759,00	4.745.561.575,00		
5	03		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	0,00	5.903.189.031,62	6.246.678.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903.189.031,62	6.246.678.661,00	343.489.629,38		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	700.000.000,00	623.535.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	623.535.750,00	-76.464.250,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	5.203.189.031,62	5.623.142.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203.189.031,62	5.623.142.911,00	419.953.879,38		
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	21.302.336.251,00	21.363.472.593,00	1.212.580.000,00	1.187.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.514.916.251,00	22.550.827.593,00	35.911.342,00		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	21.302.336.251,00	21.363.472.593,00	1.212.580.000,00	1.187.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.514.916.251,00	22.550.827.593,00	35.911.342,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	0,00	0,00	21.302.336.251,00	21.363.472.593,00	1.212.580.000,00	1.187.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.514.916.251,00	22.550.827.593,00	35.911.342,00		
7			UNSUR KEWILAYAHAN	99.000.000,00	99.000.000,00	69.274.484.329,00	65.510.692.246,00	53.184.000,00	8.516.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.327.668.329,00	65.519.208.993,00	-3.808.459.336,00		
7	01		KECAMATAN	99.000.000,00	99.000.000,00	69.274.484.329,00	65.510.692.246,00	53.184.000,00	8.516.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.327.668.329,00	65.519.208.993,00	-3.808.459.336,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Temanggung	2.000.000,00	2.000.000,00	12.099.579.503,00	11.415.566.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.099.579.503,00	11.415.566.166,00	-684.013.337,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0001	Kelurahan Temanggung I	0,00	0,00	506.565.000,00	475.053.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.565.000,00	475.053.558,00	-31.511.442,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0002	Kelurahan Temanggung II	1.000.000,00	1.000.000,00	457.565.000,00	437.443.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.565.000,00	437.443.374,00	-20.121.626,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0003	Kelurahan Butuh	1.500.000,00	1.500.000,00	513.065.000,00	492.198.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.065.000,00	492.198.850,00	-20.866.150,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0004	Kelurahan Jampiroso	500.000,00	500.000,00	698.581.000,00	665.542.250,00	10.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.565.000,00	665.542.250,00	-44.022.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0005	Kelurahan Jampirejo	1.000.000,00	1.000.000,00	679.065.000,00	653.179.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.065.000,00	653.179.140,00	-25.885.860,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0006	Kelurahan Kertosari	1.000.000,00	1.000.000,00	500.565.000,00	476.478.990,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.565.000,00	476.478.990,00	-34.086.010,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0007	Kelurahan Banyuurip	1.000.000,00	1.000.000,00	888.565.000,00	862.453.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.565.000,00	862.453.600,00	-26.111.400,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0008	Kelurahan Kowangan	0,00	0,00	610.565.000,00	605.715.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.565.000,00	605.715.850,00	-4.849.150,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0009	Kelurahan Jurang	750.000,00	750.000,00	525.565.000,00	506.223.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.565.000,00	506.223.700,00	-19.341.300,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0010	Kelurahan Tlogorejo	500.000,00	500.000,00	871.565.000,00	851.743.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.565.000,00	851.743.500,00	-19.821.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0011	Kelurahan Kebonsari	750.000,00	750.000,00	460.565.000,00	439.797.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.565.000,00	439.797.650,00	-20.767.350,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0012	Kelurahan Manding	500.000,00	500.000,00	602.565.000,00	578.445.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.565.000,00	578.445.800,00	-24.119.200,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0013	Kelurahan Mungseng	500.000,00	500.000,00	658.565.000,00	618.545.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.565.000,00	618.545.808,00	-40.019.192,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0014	Kelurahan Purworejo	0,00	0,00	487.065.000,00	455.665.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.065.000,00	455.665.828,00	-31.399.172,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0015	Kelurahan Giyanti	500.000,00	500.000,00	876.832.232,00	905.596.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.832.232,00	905.596.222,00	28.763.990,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0016	Kelurahan Madureso	500.000,00	500.000,00	724.565.000,00	690.772.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.565.000,00	690.772.358,00	-33.792.642,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0017	Kelurahan Sidorejo	6.000.000,00	6.000.000,00	1.140.565.000,00	1.147.713.350,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.565.000,00	1.147.713.350,00	4.148.350,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0018	Kelurahan Walitelon Selatan	0,00	0,00	1.062.063.800,00	1.069.370.348,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.563.800,00	1.069.370.348,00	-193.452,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0019	Kelurahan Walitelon Utara	0,00	0,00	821.565.000,00	820.952.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.565.000,00	820.952.700,00	-612.300,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Tembarak	0,00	0,00	1.881.010.237,00	1.703.899.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.010.237,00	1.703.899.042,00	-177.111.195,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Pringsurat	30.000.000,00	30.000.000,00	2.293.460.825,00	2.207.534.458,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298.460.825,00	2.212.534.458,00	-85.926.367,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kaloran	15.000.000,00	15.000.000,00	2.161.268.583,00	1.948.064.286,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.468.583,00	1.948.064.286,00	-226.404.297,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Parakan	20.000.000,00	20.000.000,00	3.178.833.364,00	2.959.221.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178.833.364,00	2.959.221.684,00	-219.611.680,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0001	Kelurahan Parakan Kauman	6.000.000,00	6.000.000,00	839.775.000,00	795.813.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.775.000,00	795.813.386,00	-43.961.614,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0002	Kelurahan Parakan Wetan	10.000.000,00	10.000.000,00	444.477.000,00	426.406.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.477.000,00	426.406.453,00	-18.070.547,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Bulu	0,00	0,00	2.027.609.679,00	1.798.314.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027.609.679,00	1.798.314.932,00	-229.294.747,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Kedu	0,00	0,00	1.999.225.639,00	1.743.341.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.225.639,00	1.743.341.514,00	-255.884.125,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Kandangan	0,00	0,00	1.877.703.223,00	1.952.150.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.703.223,00	1.952.150.201,00	74.446.978,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Candiroto	0,00	0,00	2.013.752.878,00	2.014.146.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.752.878,00	2.014.146.684,00	393.806,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Ngadirejo	0,00	0,00	2.938.243.642,00	2.886.109.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.243.642,00	2.886.109.562,00	-52.134.080,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0001	Kelurahan Manggong	0,00	0,00	1.151.654.600,00	955.755.088,00	0,00	3.516.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.654.600,00	959.271.835,00	-192.382.765,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Jumo	0,00	0,00	2.078.995.717,00	1.821.508.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.995.717,00	1.821.508.674,00	-257.487.043,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Wonoboyo	0,00	0,00	1.910.645.771,00	1.812.536.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.645.771,00	1.812.536.660,00	-98.109.111,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Kranggan	0,00	0,00	2.682.777.242,00	2.633.048.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682.777.242,00	2.633.048.564,00	-49.728.678,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0001	Kelurahan Kranggan	0,00	0,00	507.831.000,00	520.902.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.831.000,00	520.902.479,00	13.071.479,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Bejen	0,00	0,00	1.882.637.554,00	1.903.365.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.637.554,00	1.903.365.702,00	20.728.148,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Kledung	0,00	0,00	2.147.749.410,00	1.903.796.207,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.249.410,00	1.903.796.207,00	-247.453.203,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Bansari	0,00	0,00	2.125.817.318,00	1.886.421.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.817.318,00	1.886.421.665,00	-239.395.653,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Tlogomulyo	0,00	0,00	2.138.157.844,00	2.045.670.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138.157.844,00	2.045.670.698,00	-92.487.146,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Selopampang	0,00	0,00	1.949.579.870,00	1.724.486.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.579.870,00	1.724.486.785,00	-225.093.085,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Gemawang	0,00	0,00	2.036.350.846,00	1.764.994.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.350.846,00	1.764.994.494,00	-271.356.352,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Tretep	0,00	0,00	1.821.330.552,00	1.934.743.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.330.552,00	1.934.743.986,00	113.413.434,00		
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	8.349.981.385,00	6.589.498.717,00	31.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381.656.385,00	6.589.498.717,00	-1.792.157.668,00		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	8.349.981.385,00	6.589.498.717,00	31.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381.656.385,00	6.589.498.717,00	-1.792.157.668,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	8.349.981.385,00	6.589.498.717,00	31.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381.656.385,00	6.589.498.717,00	-1.792.157.668,00		
			TOTAL	2.049.661.519.130,00	2.094.249.204.054,00	1.595.817.398.614,02	1.616.059.823.766,00	133.570.669.729,98	109.382.729.815,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	394.302.506.874,00	402.339.765.701,00	2.124.690.575.218,00	2.128.782.319.282,00	4.091.744.064,00		



BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN, S.E.